

Tantangan Globalisasi terhadap Nilai-nilai Keindonesiaan

Tony Tampake

Abstract

In recent years most of social movements that are coming from under developed countries have protested against the new economic order called neoliberalism. They have criticized their governments and corporation that get involved in economic injustice and cultural imperialism created by globalization and its ideology. In this respect, there have been two problems, namely social economic discrepancy and cultural imperialism. In Indonesia millions labors are in struggle for the sake of the increasing minimum labor wage, health insurance, and labor rights. Most of them are hired by multinational corporates that practice outsourcing system. They demand from the Government to protect labour rights and to carry out "ekonomi kerakyatan" based on the Ideology Pancasila and the Constitution. This article is concerned with the challenges of globalization in Indonesian. Economically globalization has threatened the value and the spirit of 'gotong royong' and resulted in social economic imbalance. Rich people have become wealthier and those who are poor become more and more poor. Socially, communal violence and conflict in the name of cultural and religious identities have emerged in communities. A number of religious movements have got involved in terrorist attacks as a way of resistance that aims to protect their identity.

Keywords: Globalization, Indonesian.

Pengantar

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu berjalan di antara dua hal yang saling tarik menarik, yaitu konteks ideal keindonesiaan yang terdiri dari cita-cita luhur kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan konteks faktual perubahan sosial yang disebabkan oleh proses globalisasi. Persoalan yang selalu harus dijawab adalah bagaimana melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan di tengah-tengah ragam tantangan dan peluang yang diberikan oleh proses globalisasi dewasa ini. Apabila persoalan ini tidak dapat dijawab maka Indonesia tidak saja kehilangan arah dalam perjalanan kehidupannya sebagai masyarakat dan bangsa tetapi sekaligus ia akan kehilangan jati diri keindonesiaannya. Untuk itu adalah penting untuk memahami tantangan-tantangan globalisasi dalam rangka memelihara dan mengembangkan nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Tantangan-Tantangan Globalisasi

Memahami Hakekat Globalisasi

Pada era delapan puluhan globalisasi bukanlah sebuah istilah yang dipakai secara umum. Penggunaannya masih terbatas pada perdebatan-petdebatan dalam ranah bisnis dan beberapa sudut ilmu-ilmu sosial di Eropa. Tetapi kemudian istilah itu meraih status sebagai kata kunci yang mendunia (*worldwide buzzword*) dan menjadi sebuah terminologi yang bernuansa emosional dalam wacana publik. Ada yang memahaminya sebagai suatu masyarakat sipil internasional yang kondusif bagi perkembangan era damai dan proses demokratisasi. Yang lain memahaminya sebagai era ancaman dan hegemoni negara-negara maju secara ekonomi dan militer terhadap negara-negara berkembang dan miskin. Ada juga yang melihat globalisasi sebagai sebuah konsekuensi kultural dan proses homogenisasi dunia akibat kemajuan infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi masa.¹

Globalisasi secara faktual ditandai oleh kaburnya batas-batas geografis, ideologis, dan kultural karena munculnya sebuah tata dunia baru. Di dalamnya terjadi proses kompresi ruang dengan adanya pertumbuhan pesat dalam kesalingterkaitan budaya, komoditas, informasi, dan masyarakat yang melintasi ruang dan waktu. Hal ini ditunjang oleh perkembangan teknologi dan sistem informasi untuk memadatkan ruang dan waktu. Akibatnya terjadi difusi perilaku, praktek, dan kode standar untuk proses arus informasi, uang, komoditas, dan orang-orang. Lalu lahirlah kosmopolitanisme yang ditanggapi secara beragam, ada yang mendukung, mengendalikan, dan mengawasi globalisasi dan sebaliknya ada yang menolak dan menentangnya.²

Salah satu gejala globalisasi adalah internasionalisasi modal melalui organisasi-organisasi keuangan dunia dan proses produksi serta distribusi barang dan jasa melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Komunitas global lalu terintegrasi secara intensif ke dalam satu sistem perdagangan di bawah kendali dan kekuatan modal global serta pasar bebas. Fakta yang paling menyolok dalam hal ini adalah terjadinya ekspansi pasar keuangan dunia sampai ke pelosok dunia untuk membiayai pembangunan dan perdagangan internasional. Peran negara dan pemerintah menjadi

¹ Peter Berger & Samuel Huntington (Ed.), *Many Globalization: Cultural Diversity in the Contemporary World* (New York: Oxford University Press, 2002), 235.

² Nicholas Abercrombie et.al., *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

sangat kecil dalam mengatur sistem produksi dan distribusi barang dan jasa untuk warganya.

Tantangan-Tantangan Globalisasi

a. Tantangan di bidang Ekonomi.

Sebagai sebuah proyek ekonomi, globalisasi telah mempromosikan dan melegitimasi pemusatan struktur-struktur kekuasaan multi segi yang disebut neoliberalisme. Hal ini kemudian terwujud dalam kapitalisme neoliberal dan globalisasi neoliberal.³ Ada kecurigaan bahwa neoliberalisme telah menjadi selubung ideologis bagi sejumlah proyek globalisasi ekonomi sehingga kekuasaan dan dominasi makin menggurita melalui jaringan antar institusi internasional, kebijakan nasional, praktik korporasi dan investasi yang saling terjalin satu sama lain. Hal ini nampak jelas melalui sistem keuangan dunia yang telah dikendalikan oleh tiga lembaga paling berkuasa saat ini, yaitu *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *World Trade Organization* (WTO). Mereka mengendalikan pasar dan modal global serta melindungi keuntungan maksimum negara donor dan pemilik modal. Akibatnya pemerintah-pemerintah nasional yang menjadi peminjam dana tidak berdaya dalam mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa untuk masyarakatnya. Di Indonesia misalnya, sistem subsidi pemerintah dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat perlahan-lahan dihapuskan demi mengikuti arah kebijakan ekonomi IMF, *World Bank*, dan WTO. Meskipun pemerintah melakukannya dengan dalih pemerataan dan keadilan dalam penggunaan devisa negara, tetapi tetap saja penghapusan subsidi tersebut berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat oleh karena kenaikan harga-harga barang dan jasa.

Sebuah studi kritis yang dilakukan oleh sebuah komisi dari *World Council of Churches/WCC* menemukan sepuluh asumsi globalisasi ekonomi yang mengancam keadilan dan kesejahteraan sosial,⁴ yaitu:

1. Bahwa properti menjadi prasyarat satu-satunya untuk menentukan siapa yang berhak dalam perekonomian.

³ World Communion of Churches, *Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth* (Jenewa: WCC, 2006), 13.

⁴ World Communion of Churches, *Alternative Globalization*, 14-16.

2. Bahwa masyarakat adalah kumpulan orang yang mementingkan kepentingan diri mereka sendiri.
3. Bahwa segala sesuatu, termasuk manusia dapat dijadikan komoditi dan diperjualbelikan di pasar.
4. Bahwa kemiskinan hanya dapat dilenyapkan dengan model ekonomi pasar bebas.
5. Bahwa deregulasi di bidang ketenagakerjaan yang memungkinkan mengalirnya arus investasi asing menjadi syarat mutlak untuk membuka kesempatan kerja.
6. Bahwa pertumbuhan ekonomi mensyaratkan pemusnahan aktifitas ekonomi kecil dan menengah yang tidak efisien dan menghidupkan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai modal dan teknologi.
7. Bahwa dengan memberi kesempatan yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan multinasional dan masuknya modal asing maka usaha-usaha ekonomi berskala perorangan akan dapat bertumbuh walaupun mengalami kesulitan sejenak.
8. Bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang membatasi kedaulatannya dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi.
9. Bahwa persaingan dan pasar bebas secara gaib akan memberi keuntungan kepada semua orang.
10. Bahwa integrasi ke dalam globalisasi ekonomi merupakan sebuah keniscayaan yang membawa keuntungan.

Asumsi-asumsi ini bersifat manipulatif karena kenyataan menunjukkan terjadinya penumpukan modal dan kekayaan pada segelintir kecil orang, sementara sejumlah besar orang hidup dalam kemiskinan. Ada 80 persen penduduk dunia harus berbagi dari 14 persen barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok mereka, sementara ada 20 persen orang-orang kaya yang menguasai 86 persen konsumsi global barang dan jasa.⁵ Apa yang terjadi di sini adalah pemusatan uang pada minoritas yang berkuasa akibat akumulasi modal dalam sistem ekonomi global dewasa ini.

Proses globalisasi di bidang ekonomi inilah yang menjadi tantangan bagi pewujudan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan nilai-nilai keindonesiaan. Dalam Pasal 33 UUD 45 ditegaskan:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

⁵ World Communion of Churches, *Alternative Globalization*, 12.

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sistem ekonomi Pancasila yang bersifat kerakyatan dan menekankan kesejahteraan umum serta pemerataan seperti ini menjadi sulit untuk diwujudkan di dalam sistem ekonomi global yang liberal yang menekankan penumpukan modal, keuntungan sebesar-besarnya, dan penguasaan sumber daya oleh negara-negara maju, negara-negara donor, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Berikut beberapa contoh kasus. Ketika bahan bakar minyak dan gas (BBM&G) menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang harus terdistribusi secara merata dan terjangkau dalam pengawasan dan pengendalian negara, justru pada saat itu terjadi kenaikan harga karena tekanan dan paksaan lembaga-lembaga ekonomi internasional tersebut di atas. Ketika terjadi peningkatan angkatan kerja yang tidak diikuti oleh bertambahnya lapangan kerja, negara justru takut untuk menaikkan upah minimum regional buruh dan enggan memperbaiki undang-undang ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan para pekerja demi investasi modal asing. Pemerintah tidak punya sikap tegas terhadap sistem "*outsourcing*" di perusahaan-perusahaan multinasional bahkan di Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶ Secara sistemik cara ini menutup ruang bagi para pekerja untuk menuntut hak-hak mereka, seperti hak mendapatkan jaminan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, upah yang layak, jaminan perlindungan keselamatan kerja, asuransi, dan jaminan hari tua. Bagi perusahaan sistem ini membawa keuntungan, tetapi bagi para pekerja membawa kerugian.

Akibat dari hal tersebut di atas pemerataan kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan di Indonesia berjalan sangat lambat, bahkan dicurigai berjalan mundur.

⁶ *Outsourcing* adalah cara yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan tata kelola karyawan. *Outsourcing* dilakukan dengan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain di luar perusahaan.

Menurut berita Badan Pusat Statistik sampai dengan bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia 28, 59 juta. Itu berarti penurunan angka kemiskinan di Indonesia belum signifikan.⁷ Dalam bidang ketenagakerjaan, sampai dengan bulan Agustus 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 6,25 persen.⁸ Bila dibandingkan dengan bulan Februari 2013 sebesar 5,92 persen maka terjadi kenaikan angka pengangguran di Indonesia. Data-data dari sektor ril ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia masih menjadi masalah serius, walaupun Pemerintah mengatakan bahwa secara akumulatif terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Kalau mengacu pada indikator-indikator kemiskinan yang dirumuskan oleh BAPPENAS, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua indikator memendam masalah. Masih sering terjadi kerawanan pangan, menyusutnya kepemilikan tanah dan berkurangnya kepemilikan alat-alat produktif di kalangan masyarakat perorangan, ketidakpastian jaminan dan kesejahteraan hidup para pekerja dan buruh harian lepas, masih rendahnya daya beli dan daya tawar masyarakat, dan mahal biaya pendidikan sehingga akses terhadap pengetahuan menjadi elitis.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa transformasi ekonomi dan teknologi yang dilahirkan oleh globalisasi telah menciptakan sejumlah masalah sosial, terutama bifurkasi antara yang menang dan yang kalah.⁹ Fakta ini membuktikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam sistem ekonomi global, alih-alih membawa perbaikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, malah membuat masyarakat hidup dalam kesenjangan dan ketidakpastian. Masa depan Indonesia menjauh dari cita-cita Proklamasi dan Kemerdekaannya sendiri.

b. Tantangan di Bidang Kebudayaan

Globalisasi sebagai sebuah proyek ekonomi dan proyek kultural yang berdampak pada semua dimensi kehidupan tidak saja memadatkan ruang dan waktu, tetapi juga menimbulkan kompleksitas interaksi manusia dan kegelisahan sosial. Ia tidak saja

⁷ <http://www.bps.go.id/?news=1023>, dikunjungi tanggal 10 Februari 2014.

⁸ <http://www.bps.go.id/?news=1010>, dikunjungi tanggal 10 Februari 2014.

⁹ Peter Beyer & Lory Beaman (ed.), *Religion, Globalization, and Culture* (Leiden: Brill, 2007), 57.

menciptakan persaingan ekonomi yang semakin alot dan kesenjangan kesejahteraan yang semakin kentara, tetapi pada saat yang sama menyempitkan ruang gerak sosial dan mengaburkan identitas kultural.¹⁰ Dalam keadaan seperti ini Alberto Melluci melihat terjadinya transformasi budaya yang sangat luar biasa dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan yang impresif di bidang teknologi komunikasi yang menciptakan sebuah sistem media sedunia membuat kebudayaan-kebudayaan manusia terlibat dalam sebuah konfrontasi resiprokal masif, sehingga dimensi-dimensi kebudayaan tindakan manusia menjadi salah satu sumber daya inti untuk menguasai produksi dan konsumsi.¹¹ Indikator keadaan tersebut adalah terjadinya pergeseran fokus gerakan-gerakan sosial dari isu kelas sosial ke isu identitas kultural. Inilah fenomena baru dari konflik masyarakat global yang merangsek hingga ke level nasional dan lokal. Konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat tidak lagi terekspresi secara keseluruhan melalui aksi-aksi politik dan perjuangan kelas melainkan lewat resistensi kultural terhadap bahasa-bahasa dominan dan kode-kode yang mengatur informasi dan membentuk praktek sosial. Resistensi ini kemudian terekspresi secara sistemik ke dalam struktur sosial melalui aksi-aksi kekerasan massa, intoleransi, diskriminasi, dan tribalisme. Di sinilah letaknya episentrum konflik sosial yang mengguncang masyarakat kita sejak tahun sembilan puluhan.

Dengan membaca realitas sosial sedemikian maka itu berarti ragam gerakan sosial keagamaan di Indonesia yang sering kali dipandang sebagai gerakan bidat dan penodaan agama dan yang harus berhadapan secara menyakitkan dengan kemapanan, mayoritas, dan kekuasaan negara, sebenarnya harus dipahami sebagai respon primordial terhadap imperialisme kultural. Globalisasi sedang mencabik konsesus nasional dan keputusan politik kita untuk menjadi Indonesia yang didirikan di atas nilai sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan.¹²

Dalam pemahaman gerakan sosial keagamaan sebagai reaksi terhadap globalisasi, mereka yang termaginal dan terlibat dalam aksi-aksi unjuk rasa dan kekerasan atas nama identitas kultural, termasuk agama sebenarnya sedang melakukan resistensi terhadap identitas-identitas dominan dan hegemoni politik ekonomi yang

¹⁰ George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 634.

¹¹ Alberto Melluci dalam Hank Johnston & Bert Klandermans (ed.), *Social Movements and Culture* (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1995), 41.

¹² John Titaly, *Religiositas di Alinea Ketiga* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), 46.

menguasai dan mengendalikan ruang publik. Manuel Castells mengatakan bahwa munculnya aksi-aksi kekerasan massa dan tindakan teror dari kelompok-kelompok radikal yang berbasiskan ikatan primordial seperti etnisitas dan religiositas sebenarnya merupakan upaya resistensi dari mereka yang ada di dalam posisi atau kondisi terdevaluasi atau terstigmatisasi oleh logika dominasi.¹³ Keadaan tersebut di atas tidak terelakan dalam masyarakat kita dan telah menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya konflik sosial dan aksi-aksi kekerasan massa atas nama budaya dan agama. Ketika orang-orang mencari identitas dan menemukannya kembali pada etnisitas, maka permusuhan-permusuhan dan benturan-benturan antar peradaban menjadi bagian yang tak terpisahkan dari globalisasi.¹⁴ Inilah bahaya yang paling mengancam masyarakat global saat ini.

Secara sosial dan kultural, masyarakat Indonesia sejatinya telah menjadi sebuah masyarakat majemuk sejak ia menyatakan dirinya menjadi sebuah negara bangsa. Kemajemukan budaya Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarahnya melainkan sebuah hakekat atau esensi yang inheren dengan keindonesiaannya sendiri. Kita bisa menemukan semua peradaban besar dunia di Indonesia. Sepanjang sejarahnya peradaban-peradaban tersebut tertunen dengan kebudayaan lokal dan membentuk kebudayaan nasional. "Tak akan ada sebuah entitas bangsa dan negara yang bernama Indonesia, jika tidak ada kemajemukannya. Tidak akan ada Indonesia, jika yang ada hanya ke-ika-an, ketunggalan atau monokulturalisme," kata Azyumardi Azra.¹⁵ Namun demikian konflik global telah menjalar pada realitas masyarakat Indonesia sehingga percikan-percikan konflik global tersebut terasa di masyarakat kita. Keadaan inilah yang mengancam nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan toleransi.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas persoalannya adalah bagaimana mempertahankan sistem ekonomi yang berorientasi kerakyatan di tengah arus globalisasi dewasa ini. Bagaimana meningkatkan usaha-usaha kecil dan menengah di tengah kuku-kuku perusahaan multinasional yang menancap di setiap penjuru negeri. Bagaimana menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di tengah sistem pasar bebas di mana harga-harga diserahkan pada

¹³ Manuel Castells, *The Power of Identity* (Malden MA: Blackwell Publishing, 2004), 6-12.

¹⁴ Samuel Huntington, *Benturan antar Peradaban* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), 5

¹⁵ Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 5.

mekanisme pasar. Bagaimana menjaga dan mengembangkan nasionalisme berdasarkan nilai-nilai keindonesiaannya.

Cita-cita Kemerdekaan dan Nilai-nilai Keindonesiaan

Di dalam alinea ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah terwujudnya "kehidupan kebangsaan yang bebas." Cita-cita ini mengandung dua komponen penting, yaitu nasionalisme dan kemerdekaan. Di dalam pemikiran Soekarno nasionalisme berarti jiwa dan semangat kehidupan berbangsa yang mengatasi berbagai golongan.¹⁶ Oleh sebab itu Indonesia harus menjadi sebuah negara bangsa (*nation state*) yang membingkai semua perbedaan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal inilah NKRI menjadi salah satu pilar kebangsaan dan keindonesiaan. Sedangkan kemerdekaan adalah antitesis terhadap kolonialisme. Merdeka berarti bebas dari penindasan dan penjajahan. Merdeka berarti juga memiliki kedaulatan atas nasib sendiri. Merdeka berarti pintu gerbang emas untuk memasuki masa depan yang sejahtera secara bersama. Oleh sebab itu di dalam alinea keempat ditegaskan tentang perlunya otoritas negara yang bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaaskan kehidupan bangsa,
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Cita-cita tersebut di atas harus diwujudkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu nilai persatuan, kebebasan, ekualitas atau kesederajatan, dan kekeluargaan.¹⁷ Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan bahwa kita mendirikan negara Indonesia dari semua untuk semua. Indonesia didirikan bukan untuk sekelompok orang, tetapi "Indonesia buat Indonesia." Inilah konsep masyarakat gotong royong menurut Soekarno. Gotong royong menurutnya menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah banting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan *bantu-binantu* bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kesejahteraan semua. Itu berarti keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia harus diwujudkan

¹⁶ Bung Karno, *PANTJASILA: Dasar Filsafat Negara* (Jakarta: Jajasan Empu Tantular, 1960), 63.

¹⁷ Thobias Messakh, *Konsep Keadilan dalam Pancasila* (Salatiga: Program Pascasarjana Progdii Sosiologi Agama, 2007), 155-160.

berdasarkan nilai-nilai gotong royong. Dalam konsep ini secara normatif tidak akan ada ruang bagi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Oleh sebab itu harus ditegaskan bahwa pembangunan dan pemerataan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah pengamalan nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Persoalannya adalah apakah nilai-nilai gotong tersebut di atas tetap menjadi jiwa dan semangat di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah pusaran globalisasi? Sejauh mana kebijakan publik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan program-program pembangunan mencerminkan nilai-nilai tersebut di atas? Ketika di satu pihak globalisasi mengaburkan batas-batas geografis, ideologis, dan kultural, sementara di lain pihak sentimen dan prasangka primordialisme kesukuan dan keagamaan kembali menguat di dalam masyarakat, maka apa yang harus dilakukan untuk menjaga cita-cita dan nilai-nilai keindonesiaan itu?

Kesimpulan: Tantangan Bersama

Tidak dapat disangkal bahwa globalisasi telah menghadirkan tantangan-tantangan baru bagi pewujudan cita-cita dan nilai-nilai keindonesiaan. Kalau sebelumnya keindonesiaan ditantang oleh sistem kolonialisme dan imperialisme Barat maka sekarang keindonesiaan ditantang oleh globalisasi ekonomi dan ekspansi budaya dominan. Sistem keuangan dan perdagangan global telah menyebabkan terjadinya swastanisasi pengelolaan sumber-sumber alam yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, menguatnya persaingan antar kekuatan-kekuatan produksi dalam negeri dan yang akhirnya dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan produksi berbasis perusahaan multinasional, meningkatnya arus urbanisasi menyusul proses industrialisasi di kawasan perkotaan, dan melebarnya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Inilah yang disinyalir oleh John Titalley sebagai dominasi ekonomi dan kultural yang sedang mengancam Indonesia. Menurutnya Indonesia secara militer dan politik telah merdeka, tetapi di bidang ekonomi dan budaya Indonesia masih belum dapat melepaskan diri dari imperialisme bangsa-bangsa lain yang kuat.¹⁸

Kondisi-kondisi faktual ini mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran demografi dan perubahan struktur sosial yang pada gilirannya mengakibatkan krisis

¹⁸ John Titalley dalam Tim Balitbang PGI (ed.), *Meretas Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 2018.

ekonomi, sosial, dan kultural di dalam kehidupan masyarakat. Jalinan tenun masyarakat (*fabric of society*) terkoyak dan tercabik akibat berbagai krisis dalam bentuk disorientasi dan dislokasi di kalangan masyarakat, misalnya disintegrasi sosial yang bersumber dari euphoria kebebasan yang nyaris '*kebablasan*,' lenyapnya kesabaran sosial (*social temper*) dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga orang mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindak kekerasan dan anarki, merosotnya penghargaan dan kepatuhan pada hukum, etika, moral, kesantunan sosial, dan keadaban publik, serta berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bernuansa politis, etnis, dan agama di beberapa penjuru negeri.¹⁹

Dari sini kemudian muncul persoalan-persoalan diantaranya adalah: bagaimana melakukan internalisasi nilai-nilai keindonesiaan di dalam rangka membangun karakter bangsa? Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti kemiskinan struktural, integrasi dan kohesi sosial, identitas dan kolaborasi kultural, toleransi dan kerukunan antara masyarakat? Beberapa dasawarsa terakhir ini kita prihatin dengan berbagai kasus terorisme, konflik sosial, krisis identitas, fanatisme kesukuan, intoleransi dan kekerasan atas nama identitas kultural. Semua mengindikasikan bahwa cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan nilai-nilai keindonesiaan sedang mengalami ujian berat. Oleh karena itu tanggung jawab bersama semua komponen bangsa Indonesia adalah mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai keindonesiaan di dalam menghadapi globalisasi dan membangun serta mensejahterahkan seluruh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas (dkk.) *Kamus Sosiologi*. Diterjemahkan oleh Desi Noviyani (dkk.) dari judul asli *The Penguin Dictionary of Sociology*, 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Berger, Peter & Samuel Huntington (Ed.), *Many Globalization: Cultural Diversity in the Contemporary World*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Beyer, Peter & Lory Beaman (Ed.), *Religion, Globalization, and Culture*. Leiden: Brill, 2007.

¹⁹Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, 6.

Castells, Manuel. *The Power of Identity*. Malden, MA: Blackwell Publishing: 2004.

Huntington, Samuel. *Benturan Antar Peradaban*. Diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail dari judul asli: *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, 1996. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003.

Melluci, Alberto, dalam Hank Johnston and Bert Klandermans (Ed.): *Social Movements and Culture*. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1995.

Messakh, Thobias. *Konsep Keadilan Dalam Pancasila* Salatiga: Program Pascasarjana Doktor Sosiologi agama, 2007.

Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern*. Diterjemahkan oleh Muhammad Taufik dari judul asli: *The Postmodern Social Theory*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.

Titaley, John. *Kemerdekaan dan Masa Depan Indonesia*, dalam Tim Balitbang PGI, *Meretas Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulian, 2003.

_____. *Religiositas Di Alinea Ketiga*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013.

World Council of Churches. *Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth*. Jenewa: WCC, 2006.